
Implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem OOS RBA di DPMPTSP Kota Prabumulih

Implementation of Processed Food Certificates Based on the RBA OOS System in DPMPTSP Prabumulih City

Tri Handayani, Maulana & Muhammad Ervan Marzuki*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Tamansiswa Palembang,
Indonesia

Diterima: 05 Agustus 2024; Direview: 05 Agustus 2024; Disetujui: 16 Agustus 2024

*Corresponding Email: ervan@unitaspalembang.ac.id

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Berbasis Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem OSS-RBA di DPMPTSP Kota Prabumulih bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. Meskipun memiliki potensi besar, pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan anggaran untuk sosialisasi, kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha, dan masalah dalam pelatihan serta fasilitas pegawai. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan peningkatan pelatihan, perbaikan fasilitas, serta tambahan sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi OSS-RBA dapat lebih efisien dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik di Kota Prabumulih.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Industri Rumah Tangga, OSS

Abstract

This article or writing aims to analyze the Implementation of the Policy for Issuing Certificates for Fulfillment of Home Industry Processed Food Production Commitments (SPP-IRT) Based on the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) System at the Prabumulih City Investment and One-Stop Integrated Services Service and its supporting factors. and the inhibitor. Data was collected through observation, interviews, and document study and analyzed qualitatively. This study concludes that implementing Processed Food Certificates Based on the OSS-RBA System in DPMPTSP Prabumulih City aims to coordinate and speed up the licensing process. Even though it has great potential, its implementation faces significant challenges such as a limited budget for outreach, a lack of understanding among business actors, and problems in employee training and facilities. To increase effectiveness, increased training, improved facilities, and additional human resources are needed. With these steps, it is hoped that the implementation of OSS-RBA can be more efficient and provide better public services in Prabumulih City.

Keywords: Policy Implementation, Home Industry, OSS

How to Cite: Handayani, T., Maulana & Marzuki, M.E., (2024), Implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem OOS RBA di DPMPTSP Kota Prabumulih. *Journal of Law & Policy Review*. 2 (2): 250 - 257.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dari efektivitas dan keberhasilan pemerintahan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat (Manik et al., 2020). Prinsip good governance, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Kaban et al., 2017; Triyanto et al., 2021). Reformasi birokrasi, yang dimulai pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan di tingkat lokal dan nasional (Yusriadi, 2018). Salah satu langkah strategis dalam reformasi ini adalah pengembangan e-government, yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. E-government bertujuan untuk memanfaatkan teknologi digital guna memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat (Sarjana et al., 2021; Sinaga et al., 2022).

Di Kota Prabumulih, reformasi perizinan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 mengalihkan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Harahap et al., 2022). DPMPTSP bertanggung jawab atas berbagai jenis perizinan, yang terbagi dalam kategori perizinan berbasis risiko dan perizinan non-risiko (Sebayang et al., 2022). Perizinan berbasis risiko mencakup sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti sektor industri dan pertambangan. Di sisi lain, perizinan non-risiko meliputi sektor-sektor yang lebih administratif, seperti kesehatan, perdagangan, dan pendidikan (Apriani et al., 2022; Efendi et al., 2022; Saputra et al., 2022; Syarif et al., 2023)

Reformasi sistem perizinan ini dilakukan melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS), yang diluncurkan untuk mengatasi permasalahan regulasi yang kompleks dan tumpang tindih (Suwarni et al., 2022). Sistem OSS dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan dengan integrasi berbagai jenis izin ke dalam satu platform digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi yang sering menghambat proses perizinan (Ratnasari et al., 2022).

Namun, meskipun sistem OSS diharapkan dapat memperbaiki proses perizinan, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan (Khainuddin et al., 2019; S et al., 2019). Berdasarkan data wawancara yang dilakukan pada 8 September 2023, sejumlah hambatan signifikan telah diidentifikasi. Gangguan pada server OSS sering terjadi, menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan izin. Selain itu, kurangnya pemahaman di kalangan petugas mengenai prosedur dan sistem yang baru juga menghambat proses pendaftaran. Masalah administratif, seperti ketidakaktifan email dan kesulitan teknis dalam penggunaan platform OSS, juga menjadi kendala tambahan yang harus diatasi.

Di tengah tantangan ini, sektor pangan olahan industri rumah tangga (IRTP) menjadi salah satu area yang memerlukan perhatian khusus. IRTP memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, terutama dalam penyediaan pangan yang aman dan berkualitas untuk masyarakat (Dewi et al., 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019, IRTP diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan (SPP-IRT) (Halawa & Batubara, 2022; Suwandi et al., 2023). Sertifikat ini merupakan jaminan bahwa produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Siahaan et al., 2020). Meskipun regulasi ini telah ada, masih banyak IRTP yang belum memiliki SPP-IRT. Proses perizinan yang rumit dan sering kali tidak transparan menjadi salah satu penyebab utama mengapa sertifikasi ini belum diperoleh oleh banyak pelaku usaha (Husin et al., 2022).

Sistem OSS RBA (Risk-Based Approach) yang diperkenalkan pada 9 Agustus 2021, sebagai bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan untuk mengatasi masalah perizinan dengan pendekatan yang lebih efisien dan sederhana (Rahman, 2022). Sistem OSS RBA dirancang untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan proses perizinan berbasis risiko, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dengan risiko rendah dan meningkatkan transparansi dalam proses perizinan (Saragih et al., 2019). Implementasi sistem ini diharapkan dapat mengatasi berbagai

tantangan yang dihadapi dalam penerbitan SPP-IRT dan meningkatkan efisiensi proses perizinan secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan SPP-IRT berbasis OSS RBA di DPMPTSP Kota Prabumulih. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam mengenai bagaimana sistem OSS RBA mempengaruhi proses perizinan, serta rekomendasi untuk perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di Kota Prabumulih. Dengan memahami tantangan dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini, diharapkan dapat dicapai peningkatan dalam kualitas pelayanan perizinan dan dukungan yang lebih baik untuk pelaku usaha di sektor pangan olahan industri rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan (SPP-IRT) berbasis sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih.

Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memantau proses perizinan dan interaksi di DPMPTSP. Wawancara dilakukan dengan enam informan yang mencakup pejabat DPMPTSP, petugas perizinan, dan pelaku usaha dari sektor pangan olahan industri rumah tangga (IRTP). Studi dokumentasi mengumpulkan data dari dokumen kebijakan dan laporan administrasi.

Desain penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pengambilan sampel purposive untuk memilih informan yang relevan. Variabel yang diukur meliputi dukungan infrastruktur, pelatihan petugas, kesadaran pelaku usaha, serta hambatan seperti kendala teknis dan administratif. Analisis data menggunakan model interaktif, yang mencakup penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan, untuk memberikan wawasan mendalam tentang pelaksanaan kebijakan dan tantangan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem OOS RBA di DPMPTSP Kota Prabumulih

Implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih adalah langkah strategis untuk memperbaiki sistem perizinan di Indonesia. Sistem OSS-RBA, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai aspek risiko dalam satu platform. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di tingkat lokal menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dianalisis secara mendalam untuk mencapai hasil yang optimal.

Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam implementasi sistem OSS-RBA. DPMPTSP Kota Prabumulih, sebagai pelaksana kebijakan ini, telah melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan sistem baru ini kepada pelaku usaha. Sosialisasi ini meliputi workshop, seminar, dan bimbingan teknis yang dirancang untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan sistem OSS-RBA dan manfaatnya. Namun, efektivitas sosialisasi ini masih menjadi tantangan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala DPMPTSP, terdapat beberapa kendala dalam mencapai seluruh pelaku usaha. Sosialisasi yang dilakukan melalui workshop dan seminar sering kali menghadapi batasan jangkauan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang membatasi frekuensi dan cakupan sosialisasi.

Meskipun DPMPTSP telah melakukan OSS on the Spot di beberapa kelurahan dan pusat keramaian, masih banyak pelaku usaha, terutama di wilayah yang lebih terpencil, yang belum mendapatkan informasi yang memadai. Hal ini berakibat pada kurangnya pemahaman dan ketidaksiapan pelaku usaha dalam menggunakan sistem OSS-RBA. Sosialisasi harus dilakukan

dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif, seperti pemanfaatan media sosial, penyuluhan door-to-door, dan peningkatan kolaborasi dengan asosiasi pengusaha lokal untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Penekanan pada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa informasi mengenai OSS-RBA sampai ke semua pihak yang relevan.

Sumber daya, baik manusia maupun fasilitas, merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dari segi sumber daya manusia (SDM), DPMPTSP Kota Prabumulih memiliki 76 pegawai dengan berbagai latar belakang pendidikan. Meskipun jumlah pegawai cukup, kualitas dan kompetensi mereka dalam mengelola sistem OSS-RBA masih perlu ditingkatkan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang sistem baru ini. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis berdampak negatif pada efektivitas pegawai dalam mengoperasikan sistem OSS-RBA. Hasil wawancara dengan pegawai menunjukkan bahwa mereka merasa kurang siap dalam menjelaskan dan mengatasi masalah yang dihadapi pelaku usaha terkait sistem ini. Pelatihan yang lebih mendalam dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dari segi fasilitas, DPMPTSP Kota Prabumulih telah menyediakan beberapa sarana untuk mendukung implementasi kebijakan, seperti ruang konsultasi dan pendampingan. Namun, terdapat kekurangan dalam hal peralatan seperti mesin scan, mesin fotokopi, dan akses internet yang memadai. Keterbatasan fasilitas ini dapat memperlambat proses layanan dan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Peningkatan infrastruktur, termasuk penyediaan peralatan yang memadai dan akses internet yang stabil, sangat penting untuk mendukung kelancaran implementasi sistem OSS-RBA.

Sikap dan disposisi para pelaksana juga berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, sikap positif dan komitmen pegawai DPMPTSP Kota Prabumulih sangat penting untuk keberhasilan implementasi OSS-RBA. Berdasarkan teori Edward III tentang implementasi kebijakan, disposisi positif dari para pelaksana dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa pegawai DPMPTSP memiliki sikap yang positif dan berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem OSS-RBA. Mereka aktif dalam memberikan bantuan dan pendampingan kepada pelaku usaha. Namun, sikap positif ini perlu didukung dengan pelatihan yang memadai dan fasilitas yang memadai agar pegawai dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif. Kurangnya pelatihan dan fasilitas dapat mengurangi efektivitas sikap positif ini. Para pegawai juga menunjukkan keinginan untuk memperbaiki proses perizinan dan mendukung pelaku usaha. Namun, tanpa dukungan yang memadai dalam bentuk sumber daya dan pelatihan, sikap positif mereka mungkin tidak dapat diterjemahkan ke dalam tindakan yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pegawai tidak hanya memiliki sikap positif tetapi juga dilengkapi dengan keterampilan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.

Berdasarkan analisis di atas, implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem OSS-RBA di DPMPTSP Kota Prabumulih menunjukkan beberapa kemajuan, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, dan disposisi positif dari para pelaksana adalah faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Untuk mengatasi tantangan yang ada, beberapa rekomendasi dapat diajukan: Pertama, perlu dilakukan upaya sosialisasi yang lebih luas dan terstruktur untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha mendapatkan informasi yang memadai tentang sistem OSS-RBA. Penggunaan media sosial, penyuluhan langsung, dan kolaborasi dengan asosiasi pengusaha lokal dapat membantu memperluas jangkauan sosialisasi. Kedua, peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai DPMPTSP sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengoperasikan sistem OSS-RBA. Pelatihan yang berkelanjutan dan mendalam akan membantu pegawai dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelaku usaha.

Ketiga, investasi dalam infrastruktur, termasuk penyediaan peralatan yang memadai dan akses internet yang stabil, diperlukan untuk mendukung implementasi sistem OSS-RBA. Fasilitas

yang memadai akan mempercepat proses layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Keempat, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk anggaran dan sumber daya tambahan akan sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan ini. Peningkatan anggaran untuk sosialisasi dan pengadaan fasilitas akan memperkuat implementasi sistem OSS-RBA di tingkat lokal. Dengan mengatasi tantangan ini dan terus meningkatkan upaya sosialisasi, pelatihan, dan dukungan infrastruktur, DPMPTSP Kota Prabumulih dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem OSS-RBA dan mencapai tujuan perizinan yang efisien dan berbasis risiko. Keberhasilan implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Prabumulih.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem OOS RBA di DPMPTSP Kota Prabumulih

Implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih merupakan langkah penting dalam memperbaiki dan menyederhanakan proses perizinan di tingkat daerah. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Pembahasan ini akan menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi sistem OSS-RBA, dengan fokus pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan komitmen sebagai faktor utama penghambat.

Salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi OSS-RBA adalah penguatan infrastruktur teknologi. DPMPTSP Kota Prabumulih telah melakukan investasi yang signifikan dalam peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung sistem OSS-RBA. Infrastruktur yang memadai, termasuk server yang handal dan jaringan internet yang stabil, memungkinkan sistem berfungsi dengan optimal. Dengan adanya infrastruktur yang baik, proses perizinan yang terintegrasi secara digital dapat berjalan dengan lancar, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses pengajuan dan penerbitan sertifikat.

Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah juga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi OSS-RBA. Kebijakan yang jelas, regulasi yang mendukung, serta alokasi anggaran yang memadai memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan sistem ini. Selain itu, dukungan ini mencakup penyediaan pelatihan, bimbingan teknis, dan bantuan sumber daya yang diperlukan untuk memperkuat kapabilitas DPMPTSP dalam menerapkan dan mengelola sistem baru. Kebijakan yang konsisten dan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah sangat membantu dalam memastikan bahwa implementasi sistem dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan kepada pegawai DPMPTSP adalah faktor pendukung lain yang krusial. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai dalam menggunakan sistem OSS-RBA. Dengan pelatihan yang efektif, pegawai dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan perizinan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bimbingan teknis yang terus-menerus juga membantu pegawai untuk tetap terinformasi tentang pembaruan sistem dan perubahan regulasi, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan implementasi sistem.

Namun, implementasi OSS-RBA tidak lepas dari berbagai faktor penghambat yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Meskipun DPMPTSP Kota Prabumulih memiliki 76 pegawai, banyak di antaranya belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai sistem OSS-RBA. Kurangnya pelatihan ini menyebabkan pegawai merasa tidak yakin dalam menggunakan sistem dan mempengaruhi efisiensi serta kualitas pelayanan. Pegawai yang kurang terampil dalam menggunakan sistem baru mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas mereka, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam proses perizinan dan ketidakakuratan dalam pemrosesan data.

Selain itu, bimbingan teknis yang terbatas dan tidak berkelanjutan menjadi tantangan berikutnya. Meskipun pelatihan awal mungkin telah diberikan, pegawai memerlukan bimbingan

berkelanjutan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul seiring berjalannya waktu. Kurangnya bimbingan berkelanjutan dapat menyebabkan kesulitan dalam menghadapi pembaruan sistem atau perubahan dalam regulasi, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada program pelatihan dan bimbingan yang lebih intensif dan berkelanjutan agar pegawai tetap terampil dan siap menghadapi tantangan baru.

Keterbatasan jumlah pegawai juga dapat mempengaruhi efektivitas implementasi sistem. Meskipun jumlah pegawai di DPMPTSP cukup, beban kerja yang meningkat akibat penerapan OSS-RBA dapat mempengaruhi produktivitas mereka. Penambahan jumlah pegawai atau alokasi tugas yang lebih efisien diperlukan untuk menangani beban kerja yang meningkat dan memastikan pelayanan yang optimal. Beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan kelelahan di kalangan pegawai, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja mereka dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Komitmen pimpinan dan pegawai juga merupakan faktor penghambat yang signifikan. Meskipun ada dukungan dari pimpinan, menjaga komitmen seluruh pegawai seringkali menjadi masalah. Komitmen yang tidak konsisten di antara pegawai dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan sistem OSS-RBA. Selain itu, kurangnya insentif dan motivasi bagi pegawai untuk beradaptasi dengan sistem baru juga menjadi faktor penghambat. Tanpa adanya penghargaan atau insentif yang memadai, pegawai mungkin tidak memiliki dorongan yang cukup untuk menguasai sistem dan memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme motivasi yang efektif untuk meningkatkan komitmen pegawai dalam menjalankan sistem baru.

Resistensi terhadap perubahan juga menjadi kendala dalam implementasi OSS-RBA. Beberapa pegawai mungkin enggan beradaptasi dengan sistem baru karena ketidakpastian atau kesulitan dalam perubahan prosedur kerja. Untuk mengatasi resistensi ini, pendekatan komunikasi yang jelas tentang manfaat sistem dan dukungan yang kuat dalam proses transisi sangat diperlukan. Komunikasi yang efektif dapat membantu pegawai memahami manfaat dari perubahan dan mengurangi ketidakpastian yang mungkin mereka rasakan.

Secara keseluruhan, implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem OSS-RBA di DPMPTSP Kota Prabumulih menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Faktor pendukung seperti penguatan infrastruktur teknologi, dukungan kebijakan, dan pelatihan yang memadai sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem. Namun, faktor penghambat seperti kualitas dan kompetensi SDM serta komitmen pimpinan dan pegawai harus diatasi untuk memastikan sistem berjalan dengan efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menggunakan sistem OSS-RBA. Kedua, upaya untuk meningkatkan komitmen dan motivasi pegawai, termasuk pemberian insentif dan penghargaan, akan membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan. Ketiga, tambahan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang lebih efisien akan membantu menangani beban kerja yang meningkat akibat implementasi sistem baru. Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat ini secara efektif, DPMPTSP Kota Prabumulih dapat meningkatkan implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem OSS-RBA dan mencapai tujuan perizinan yang lebih efisien dan efektif.

SIMPULAN

Implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di DPMPTSP Kota Prabumulih adalah langkah strategis untuk memperbaiki sistem perizinan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. Meskipun sistem ini memiliki potensi besar, pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan. Komunikasi yang efektif menjadi kunci, namun sosialisasi yang dilakukan masih terbatas akibat kendala anggaran, mengakibatkan kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha, terutama di daerah terpencil. Sumber daya manusia dan fasilitas juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Kurangnya pelatihan dan fasilitas memadai berdampak pada efektivitas pegawai

dalam mengoperasikan sistem OSS-RBA. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan perbaikan fasilitas sangat diperlukan. Meskipun pegawai menunjukkan sikap positif, dukungan yang memadai dalam bentuk pelatihan dan infrastruktur diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif.

Implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem OSS-RBA di DPMPSTSP Kota Prabumulih telah menunjukkan kemajuan dalam memperbaiki proses perizinan. Faktor pendukung seperti penguatan infrastruktur teknologi, dukungan kebijakan yang jelas, dan pelatihan pegawai berperan penting dalam keberhasilan sistem. Namun, tantangan seperti kurangnya pelatihan, keterbatasan jumlah pegawai, dan komitmen yang tidak konsisten masih perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pelatihan berkelanjutan, peningkatan motivasi pegawai, dan tambahan sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi OSS-RBA dapat lebih efisien dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik di Kota Prabumulih.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, L., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perawat terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di RSUD Dr . R . M Djoelham Kota Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(2), 108–114. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1405>
- Dewi, T. K., Agustar, A., & Mahdi, M. (2019). Pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Dampaknya di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kota Padang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2139>
- Efendi, I., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2022). Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara. *Perspektif*, 11(2), 493–503. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5858>
- Halawa, D. K., & Batubara, B. M. (2022). Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat Effectiveness Performance Of Employees In The Field Of Social Development An. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(2), 138–144. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1409>
- Harahap, A. P. P., Harahap, R. H., & Isnaini, I. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Dalam Kemudahan Dan Kenyamanan Layanan Di Stasiun Kereta Api Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 618–626. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1259>
- Husin, H., Sriati, S., & Thamrin, M. H. (2022). Implementasi Peraturan Walikota Ternate Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Produk Lokal Khas Daerah Kota Ternate. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 111–122. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1137>
- Kaban, A., Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). Analisis Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Pembiayaan Analysis of Principles of Corporate Governance Good Corporate Governance dan Good Corporate Governance merupakan Good Corporate Governance sendiri buk. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(1), 1–16.
- Khainuddin, K., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Rawat Inap Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 22–31. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.3>
- Manik, A., Kusmanto, H., & Lubis, M. S. (2020). Analisis Reliabilitas dan Responsivitas dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 65–74. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.11>
- Rahman, F. (2022). Analisis Prediksi Finansial Distress dengan Metode Altman Z-Score dan Springate Sebelum dan Selama Covid- 19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1000>
- Ratnasari, M. O. B., Noor, I., & Hidayati, F. (2022). Analisis Pengembangan E-Government pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi pada “SURADI” di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 008(01), 35–44. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.4>
- S, A. R., Kadir, A., & Angelia, N. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Analysis of Community Satisfaction Village Head ' s Service of Medan Estate on The District of Percut Sei Tuan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 32–38.

- Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah The Role Of The Village. 4(2), 157–163. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i2.1438>
- Saragih, E. E., Mustamam, & Mukidi. (2019). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 2, No.(1).
- Sarjana, P., Ilmu, M., Publik, A., & Area, U. M. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Bus Rapid Transit Pada Dinas Perhubungan Kota Binjai Implementation of Binjai Mayor Regu. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.522>
- Sebayang, H. S. R., Sihombing, M., & Warjio, W. (2022). Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Karo. *Perspektif*, 11(4), 1476–1486. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7215>
- Siahaan, S., Batubara, S. A., & Panggabean, N. Y. (2020). Tindak Pidana Peredaran Pemalsuan Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 252–259. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.221>
- Sinaga, H. A., Limbong, D., & Isnaini, I. (2022). Peran Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tanjungbalai. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 79–90. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1127>
- Suwandi, M. I., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2023). Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Medan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2291–2307. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1565>
- Suwarni, S. M., Rinayuhani, T. R., & Afandi, A. H. (2022). IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) TERHADAP PERKEMBANGAN LAYANAN PERIZINAN UMKM DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO.
- Syarif, M., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3102–3111. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1768>
- Triyanto, D., Purnawan, H., Saputra, B., Padang, U. N., Governance, G., Publik, P., Bengkulu, K., Governance, G., Service, P., & City, B. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu Application of Good Governance Principles in Public Services At the Betungan Community Health Center , Bengkulu City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*.
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(2), 178–185.